BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di Asia. Indonesia senantiasa berkomitmen terhadap pembangunan nasional dengan tujuan mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai yang diamanahkan dalam Pancasila dan Undang Undang 1945. Pembangunan nasional adalah upaya terus-menerus yang bertujuan untuk memajukan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia. Agar tujuan ini tercapai, pembangunan harus dijalankan secara adil dan menyeluruh di semua wilayah Indonesia.

Pendapatan negara Indonesia sebagian besar bersumber dari sektor pajak, yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara secara konsisten mencapai sekitar 80-90% dari total penerimaan negara dalam APBN (Kemenkeu, 2023). Realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai Rp 1.786,9 triliun, atau 96,3% dari target APBN 2023, dengan rincian PPh Non-Migas sebesar Rp1057,3 triliun, PPN & PPnBM sebesar Rp657,2 triliun, PPh Migas sebesar Rp72,4 triliun (DGT Performance Report, 2023). Tingkat rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia terbilang rendah, yakni kurang lebih 9,8% terhadap PDB (2023) (- & Awaludin, 2023) . Hal ini menunjukkan betapa vitalnya peran pajak dalam menopang belanja pemerintah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program perlindungan sosial. Struktur pendapatan Indonesia sangat bergantung pada pajak, dengan rasio pajak terhadap PDB yang masih berkisar di angka 10-11% (Dariatno Sihalo, 2020). Meskipun relatif rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya, pajak tetap menjadi sumber utama penerimaan negara. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar, masing-masing sekitar 40% dan 30% dari total penerimaan pajak.

Ketergantungan Indonesia pada pajak membuat reformasi pajak, peningkatan cakupan objek pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan negara (Iswahyudi, 2019). Tantangan seperti rendahnya *tax ratio* dan tingginya penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih perlu diatasi agar penerimaan pajak dapat optimal. Dengan demikian, sektor pajak memegang peran sentral dalam pembiayaan negara, dan upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak terus menjadi prioritas pemerintah demi menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia.

Menurut (Samuel, 2022) selain sebagai sumber pendapatan terbesar negara Indonesia, pajak juga mempunyai manfaat lain untuk negara ataupun WP yang sadar akan pentingnya melaporkan pajak dan menyetorkan pajak ke negara. Ada beberapa manfaat pajak untuk negara yaitu seperti membangun sarana prasarana. Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk pembangunan dan perawatan berbagai sarana publik, termasuk jalan raya, jembatan, serta berbagai prasarana umum lainnya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pajak juga bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik, karena dengan pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi masyarakat, yang berkontribusi pada kesejahteraan umum. Pajak juga berguna untuk redistribusi kekayaan. Pajak juga berfungsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program-program sosial yang membantu golongan kurang mampu. Pajak bisa meningkatkan stabilitas ekonomi. Pendapatan pajak yang stabil memungkinkan pemerintah untuk mengelola ekonomi secara efektif, menghindari defisit anggaran, dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Menurut (Informasi et al., 2013) manfaat pajak bagi wajib pajak badan antara lain yaitu untuk peningkatan infrastruktur yang mendukung bisnis. Kontribusi pajak perusahaan membantu dalam pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk operasi bisnis yang efisien. Pajak memberikan pengembangan terhadap sumber daya manusia. Pajak mendanai pendidikan dan pelatihan, yang menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Dengan membayar pajak, perusahaan berkontribusi pada stabilitas

ekonomi yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Hal ini dapat menarik investor dan meningkatkan kepercayaan pasar. Perusahaan yang patuh pajak sering kali dipandang lebih positif oleh masyarakat, yang dapat meningkatkan reputasi dan loyalitas pelanggan.

Pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan yang krusial, sedangkan bagi perusahaan, pajak berkontribusi pada lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pajak memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan baik di tingkat negara maupun perusahaan.

Disamping mengetahui pentingnya dalam melaporkan pajak bagi wajib pajak badan serta mampu menghitung PPh pasal 29 dalam kebutuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan, namun dewasa ini masih ada wajib pajak badan yang tidak bisa menghitung PPh pasal 29 atau PPh kurang bayar. Dan kasus ini penulis temui pada CV. ABC dan Yayasan DEF yang selama empat tahun tidak bisa menghitung dan melaporkan SPT tahunan badan. Akibat dari tidak bisa menghitung pajak PPh pasal 29 sendiri maka CV. ABC dan Yayasan DEF harus menggunakan jasa dari Kantor Akuntan Publik ataupun dari Kantor Konsultan Pajak untuk menghitung pajaknya dan sekaligus melaporkannya. Hal ini merugikan bagi Perusahaan karena tidak hanya rugi dalam hal finansial karena harus membayar jasa untuk menghitung SPT tahunan badan tetapi juga karyawan pada CV. ABC dan Yayasan DEF tidak memiliki kemandirian dalam kecakapan menghitung PPh pasal 29 dan sekaligus membuat dan melaporkan SPT tahunan yang harus dilaporkan oleh perusahaan.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 29 merupakan langkah penting bagi badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. PPh pasal 29 merupakan pajak yang wajib dilunasi oleh wajib pajak badan terkait penghasilan yang diperoleh dalam periode satu tahun pajak, dan merupakan bagian dari pelaporan SPT Tahunan. Ada beberapa manfaat signifikan dari melakukan perhitungan. Melakukan perhitungan PPh 29 pasal membantu badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Hal

ini mengurangi risiko sanksi administratif dan denda yang dapat dikenakan akibat keterlambatan atau ketidakakuratan dalam pelaporan pajak. Kepatuhan pajak yang tinggi berkontribusi pada kesehatan fiskal negara (Sundah et al., 2020). Dengan mengetahui jumlah PPh pasal 29 yang harus dibayar perusahaan mampu menyusun perencanaan keuangan dengan lebih optimal. Ini memungkinkan badan untuk mengalokasikan dana dengan bijak, menghindari kekurangan kas, dan memastikan bahwa semua kewajiban pajak dapat dipenuhi tanpa mengganggu operasional bisnis. perencanaan pajak yang baik berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan (Janah & Munandar, 2022). Melakukan perhitungan PPh pasal 29 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, termasuk investor dan pelanggan, terhadap perusahaan. Menurut (Yusuf & Maryam, 2023) perusahaan yang transparan dalam pelaporan pajaknya cenderung mendapatkan reputasi yang lebih baik di pasar. Dengan menghitung dan membayar PPh pasal 29 menurut peraturan yang berlaku, perusahaan dapat mencegah potensi sengketa hukum yang mungkin terjadi akibat pelanggaran perpajakan. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan mengurangi biaya yang tidak terduga akibat litigasi. Data yang dihasilkan dari perhitungan PPh pasal 29 juga dapat digunakan untuk analisis kinerja perusahaan. Dengan memahami beban pajak, manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. (Badjuri et al., 2021) menunjukkan bahwa analisis kinerja pajak dapat memberikan wawasan berharga tentang posisi kompetitif perusahaan.

Ketidakkampuan dalam menghitung PPh pasal 29 dapat menyebabkan individu atau badan usaha mengalami berbagai masalah, termasuk ketidakakuratan dalam pelaporan SPT Tahunan. PPh Pasal 29 adalah kewajiban pembayaran pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu dan merupakan kewajiban yang harus dilaporkan setiap tahun. Dampak langsung dari tidak mampunya menghitung PPh pasal 29 dan melaporkan SPT Tahunan adalah penerapan sanksi administratif. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak, ketidakpatuhan

dalam pelaporan dapat berujung pada denda yang signifikan. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi wajib pajak. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai PPh pasal 29, wajib pajak akan kesulitan dalam merencanakan keuangan. Hal ini dapat mengganggu arus kas dan kemampuan untuk berinvestasi di masa depan. (Siti Chouyrunnisa, 2023) perencanaan pajak yang buruk dapat mengakibatkan pemborosan dan hilangnya peluang investasi. Ketidakkuratan dalam pelaporan pajak dapat menarik perhatian otoritas pajak untuk melakukan audit. Proses audit sering kali memakan waktu dan sumber daya, serta dapat menambah stres bagi wajib pajak. (Rizky Pebrina & Amir, 2020) wajib pajak yang mengisi SPT tidak sesuai dengan ketentuan berisiko tinggi diperiksa serta dikenakan sanksi lebih lanjut. Bagi badan usaha, ketidakmampuan menghitung dan melaporkan PPh pasal 29 dengan benar dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Investor dan mitra bisnis cenderung menghindari perusahaan yang memiliki masalah pajak (Nurasiah & Riswandari, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berhubungan erat dengan kepercayaan pemangku kepentingan.

Ketidakkampuan dalam menghitung PPh pasal 29 dan melaporkan SPT Tahunan bukan hanya masalah teknis, tetapi dapat berdampak luas pada aspek keuangan, reputasi, dan keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, wajib pajak perlu memahami tanggung jawab perpajakan yang harus dipenuhi serta mencari bantuan profesional jika dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dalam menyusun laporan tugas akhir dengan judul “ Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 Untuk Pelaporan SPT Tahunan Badan Pada Perusahaan Laba dan Nirlaba”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengedukasi bagi pembaca agar sadar akan pentingnya melaporkan pajak dan juga dapat menghitung PPh pasal 29 untuk pelaporan SPT tahunan badan.

1.2 Cakupan Fokus Kajian Tugas Akhir

Hal yang menjadi fokus kajian tugas akhir dalam tulisan ini yaitu bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan PPh pasal 29 untuk pelaporan SPT tahunan badan.

1.3 Tujuan Penulisan Kajian Tugas Akhir

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah guna mengeksplorasi pemahaman tentang penerapan perhitungan Pajak Penghasilan PPh 29 untuk pelaporan SPT tahunan badan baik dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

1.4 Manfaat Penulisan Kajian Tugas Akhir

Melalui penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman serta memperluas wawasan mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 29 untuk kebutuhan pelaporan spt tahunan badan

1. Bagi Penulis

Penulisan laporan tugas akhir ini merupakan momen berharga sekaligus peluang bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung PPh pasal 29 untuk kebutuhan pelaporan SPT tahunan sebuah perusahaan atau wajib pajak badan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan laporan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif dan menjadi bahan rujukan bagi pembaca. Sehingga dapat melakukan perhitungan PPh pasal 29, memahami bagaimana penyetoran PPh pasal 29 dan mampu membuat SPT tahunan badan untuk kebutuhan pelaporan wajib pajak badan.